

**PENGARUH INTENSITAS MODAL, PERTUMBUHAN
PENJUALAN, DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA
PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK SEMINAR PROPOSAL



Oleh:

KHARISMA AYULI

2201036040

S1-AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Nama Mahasiswa : Kharisma Ayuli

NIM : 2201036040

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 – Akuntansi

Diajukan untuk Seminar Proposal

Menyetujui,

Samarinda, 21 November 2025

Pembimbing



Anisa Abubakar Lahjie, S.E., M.Si., Ph.D

NIP. 197806302002122002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman



Dr. Fibrivani Nur Khairin, SE, M.S.A., Ak., CA., CSP., CIQaR

NIP. 19850204 200912 2 007

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. Teori Agensi	12
2.1.2. <i>Tax avoidance</i> (Penghindaran Pajak)	14
2.1.3. Intensitas Modal	15
2.1.4. Peningkatan Penjualan	16
2.1.5. <i>Corporate Social Responsibility</i>	17
2.1.6. Kepemilikan institusional	18
2.2. Penelitian Terdahulu.....	19
2.3. Kerangka Konseptual	25
2.4. Pengembangan Hipotesis	27
2.4.1. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	27
2.4.2. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	28
2.4.3. Pengaruh CSR Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	30
2.4.4. Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi antara Intensitas Modal dan <i>Tax Avoidance</i>	31
2.4.5. Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi antara Pertumbuhan Penjualan dan <i>Tax Avoidance</i>	32
2.4.6. Kepemilikan institusional sebagai Moderasi antara CSR dan <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1. Definisi Operasional.....	35
3.1.1. Variabel Dependen	35
3.1.2. Variabel Moderasi	36
3.1.3. Variabel Independen.....	37
3.1.3.1. Intensitas Modal.....	37
3.1.3.2. Pertumbuhan Penjualan.....	38
3.1.3.3. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	38
3.2. Populasi dan Sampel	39
3.2.1. Populasi.....	39
3.2.2. Sampel.....	40
3.3. Jenis dan Sumber Data	42
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	42
3.5. Alat Analisis Data	43
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif	43
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	44
3.5.2.1. Uji Normalitas.....	44
3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas.....	44
3.5.2.3. Uji Multikolinearitas	45
3.5.2.4. Uji Autokorelasi	45
3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	46
3.5.4. Moderated Regression Analysis (MRA)	46
3.5.5. Uji Hipotesis	47
3.5.5.1. Uji Parsial (Uji T).....	48
3.5.5.2. Uji F	48
3.5.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	49
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara 2021-2024	1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1 Hasil Pemilihan Sampel	40
Tabel 3.2 Sampel Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	27
Gambar 2.2 Model Penelitian	34

DAFTAR SINGKATAN

BEI	Bursa Efek Indonesia
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
ETR	Effective Tax Rate
VIF	Variance Inflation Factor

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih bergantung kepada pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak memegang peran yang vital dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat (Ristanti, 2022). Ketergantungan ini tercermin dalam data realisasi pendapatan negara yang menunjukkan bahwa pajak secara konsisten menyumbang porsi terbesar terhadap pendapatan negara selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara 2021-2024

(Dalam Milyar Rupiah)

Realisasi Pendapatan Negara 2021-2024			
Tahun	Pendapatan Negara	Pendapatan Pajak	Persentase
2021	2.011.347,10	1.547.841,10	77,0%
2022	2.635.843,10	2.034.552,50	77,2%
2023	2.637.248,90	2.118.348,00	80,3%
2024	2.802.293,50	2.309.859,80	82,4%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan tabel 1.1, pajak secara konsisten berkontribusi terhadap penerimaan negara lebih dari 75% setiap tahunnya (2021-2024). Bahkan di tahun 2024 penerimaan pajak mencapai 82,4% dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara bergantung terhadap pendapatan dari pajak. Oleh karena itu, pemerintah akan memaksimalkan upaya untuk menghimpun pendapatan dari sektor ini untuk tetap menjaga sumber utama pendapatan negara (Worokinasih & Imamah, 2025).

Pemungutan pajak menjadi suatu hal yang menantang karena perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai wajib pajak (Komalasari & Suharna, 2024). Menurut Malik et al., (2022), semenjak pajak membatasi kemampuan ekonomi wajib pajak, maka wajib pajak cenderung berkeinginan untuk membayar seminimal mungkin. Keadaan serupa berlaku untuk skala perusahaan sebagai wajib pajak badan yang berorientasi terhadap laba dan harus menjaga kinerja keuangan agar tetap maksimal. Namun, upaya tersebut tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini kemudian mendorong timbulnya praktik *tax avoidance*.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Tutupoho et al., (2023), merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Berbeda dengan *tax evasion*, *Tax avoidance* masih dianggap legal untuk dilakukan karena praktik *Tax avoidance* cenderung memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan (Putri & Nurdin, 2023). Salah satu kasus mengenai *tax avoidance* dilakukan oleh PT. Bentoel International Investama, Tbk. Kasus ini terjadi ketika perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) diduga melakukan *tax avoidance* melalui PT Bentoel Internasional Investama, Tbk (RMBA). *Tax avoidance* dilakukan melalui skema *inter-company loan* dari perusahaan afiliasi di Belanda untuk membiayai utang bank dan pembelian mesin, serta melalui pembayaran royalti, ongkos, dan layanan ke Inggris yang mengakibatkan kerugian perusahaan yang

membesar dengan tidak wajar dan dapat diimbangi dengan pengurangan pajak di masa mendatang (Rohendi & Darsita, 2022).

Kasus serupa juga terjadi pada perusahaan sub-sektor makanan dan minuman di Indonesia. Contohnya, kasus *tax avoidance* oleh PT Indofood Sukses Makmur. Kasus ini melibatkan pengalihan aset dan liabilitas kepada entitas baru dalam rangka ekspansi bisnis (Ramadhani & Jamaluddin, 2025). Fenomena ini menunjukkan praktik *tax avoidance* dapat terjadi karena adanya peluang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak demi meminimalkan kewajiban pajak (Safitri & Damayanti, 2021). Meskipun *tax avoidance* bukan kegiatan yang melanggar hukum, namun praktik ini tetap merugikan negara karena dapat mengurangi penerimaan pajak (Andrilia & Setiyawati, 2025). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Industri makanan dan minuman merupakan sektor yang stabil karena produknya termasuk kebutuhan dasar masyarakat, sehingga permintaannya tetap kuat meskipun kondisi ekonomi sedang melemah. Sektor ini dipandang sebagai salah satu kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak nasional karena kinerja industrinya yang konsisten dan positif (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Selain itu, perusahaan makanan dan minuman memiliki karakteristik sebagai industri dengan potensi ekspansi produk yang cepat (Yuliati, 2025). Perusahaan di sektor ini juga menghadapi tuntutan keberlanjutan dan regulasi lingkungan yang semakin ketat yang mendorong inovasi dalam proses produksi dan pengelolaan limbah (Sigalingging et al., 2025). Di sisi lain, adanya

kasus praktik *tax avoidance* pada perusahaan dalam sub sektor makanan dan minuman menunjukkan bahwa sektor ini masih memiliki potensi untuk melakukan strategi *tax avoidance*, sehingga sektor ini relevan untuk dianalisis.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* adalah intensitas modal. Intensitas modal merupakan modal perusahaan dalam bentuk kepemilikan aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional (Widyastuti et al., 2022). Kepemilikan aset tetap tersebut menimbulkan biaya penyusutan yang diakui dalam laporan keuangan (Matitaputty & Ramadhan, 2023). Semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki, maka akan semakin tinggi juga potensi penyalahgunaan biaya penyusutan untuk mengurangi laba kena pajak dan meminimalkan kewajiban pajak perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan praktik *tax avoidance* melalui kebijakan akuntansi terkait penyusutan aset tetap. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan positif antara intensitas modal dan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Andrilia & Setiyawati (2025) dan Widyastuti et al., (2022) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, Rachmania & Zahra (2025) dan Hendrianto et al., (2022) menunjukkan hasil yang berbeda mengenai intensitas modal yang berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu penelitian Ristanti (2022), menjelaskan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pertumbuhan penjualan juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Menurut Manurung et

al., (2024), pertumbuhan penjualan merupakan indikator perusahaan dalam menilai pertumbuhan atas penjualan dari tahun ke tahun. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi umumnya dianggap memiliki kinerja yang baik (Ramadhani & Jamaluddin, 2025). Namun, peningkatan pertumbuhan penjualan yang meningkatkan laba dapat menyebabkan beban pajak perusahaan meningkat. Keadaan ini dapat mendorong pihak manajemen perusahaan untuk mencari strategi *tax avoidance* untuk mengurangi dampak peningkatan beban pajak yang harus dibayar (Nabila & Aryani, 2025).

Penelitian sebelumnya yang berfokus terhadap pengaruh dari pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan Amaliya & Sudarmanto (2025) dan Safitri & Damayanti (2021) menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendrianto et al., (2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Musyafa'ah et al., (2023) mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Corporate Social Responsibility (CSR) juga menjadi elemen penting yang patut dipertimbangkan pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi kepada lingkungan dan masyarakat guna mencapai tujuan memaksimalkan keberlanjutan nilai perusahaan dan komunitas yang lebih luas (Widianti & Prasetyo, 2023). Kegiatan CSR diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 dan Peraturan Pemerintah

No. 47 Tahun 2012, yang menetapkan bahwa Perseroan wajib melaksanakan CSR sebagai bagian dari kegiatan usahanya. Semenjak pengungkapan CSR diwajibkan bagi perusahaan publik, perusahaan mengintegrasikan CSR ke dalam strategi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sekaligus memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif kepada masyarakat (Widianti & Prasetyo, 2023).

Perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan dan mempertahankan reputasi mereka, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan CSR (Wulandari & Fanani, 2024). Perusahaan dengan reputasi yang baik cenderung berupaya mempertahankan citra tersebut, sehingga semakin tinggi kinerja CSR suatu perusahaan, semakin rendah kemungkinan untuk melakukan *tax avoidance* (Putri et al., 2024). Namun, beberapa penelitian mengasumsikan bahwa CSR dapat menjadi topeng untuk menutupi praktik manipulatif perusahaan, termasuk *tax avoidance*. Dengan kata lain, perusahaan yang mungkin terlihat memiliki reputasi baik dihadapan publik, namun belum tentu memiliki etika bisnis yang baik dalam operasional perusahaan.

Penelitian mengenai CSR menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian oleh Dyah et al., (2023) dan Wulandari & Fanani (2024) menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin aktif kegiatan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka kecenderungan perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance* juga semakin tinggi. Namun, penelitian yang dilakukan Mkadmi & Ali (2024) dan Zoebar & Miftah (2020) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Agustyo & Arianti (2024)

dan Juliana & Stiawan (2022) menjelaskan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Terdapat perbedaan hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara CSR dan *tax avoidance* menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Pengambilan keputusan perusahaan mengenai strategi pajak tidak lepas dari peran kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah pihak yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan serta melakukan pengawasan operasional perusahaan (Ristanti, 2022). Kepemilikan saham oleh investor institusional memiliki wewenang untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan mengutamakan kepentingan para pemegang saham di dalam setiap kebijakan manajemen (Fatimah & Nurdin, 2024). Dengan adanya kepemilikan institusional, maka praktik *tax avoidance* dapat diminimalisir karena adanya mekanisme corporate governance yang baik dalam perusahaan (Fitri & Hakim, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian Manurung et al., (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memperlemah pengaruh atas intensitas modal dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Namun, Fitri & Hakim (2024) dan Rachmania & Zahra (2025) menemukan bahwa kepemilikan institusional memperkuat pengaruh intensitas modal dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ristanti (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan terdapat inkonsistensi dalam pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan CSR terhadap *tax*

avoidance. Penelitian dengan menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi juga belum banyak dilakukan. Keadaan ini menciptakan kesempatan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan CSR terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024 untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini berfokus terhadap praktik *tax avoidance*, dengan mengangkat judul **“Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI?

3. Apakah CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI?
4. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI?
5. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI?
6. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara CSR terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.
3. Menganalisis pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

4. Menganalisis peran Kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara intensitas modal dan *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.
5. Menganalisis peran kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Pertumbuhan Penjualan dan *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.
6. Menganalisis peran kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara CSR dan *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya terkait dengan *tax avoidance*. Dengan mengkaji pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan CSR terhadap *tax avoidance* serta peran kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur akademik dan menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pajak perusahaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti otoritas pajak dan manajemen perusahaan. Bagi otoritas pajak, penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan

kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi praktik *tax avoidance*. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan modal, pertumbuhan penjualan, tanggung jawab sosial, serta peran kepemilikan institusional dalam mendukung kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Menurut Jensen et al., (1976), teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal memberikan sebagian wewenang mereka kepada agen untuk mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan. Hal ini menjadikan agen sebagai perwakilan prinsipal dalam menjalankan kegiatan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kinerja perusahaan. Sebagai perwakilan prinsipal, agen dituntut untuk dapat memenuhi kepentingan prinsipal (Nabila & Aryani, 2025).

Namun, kepentingan agen tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal, sehingga menimbulkan konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan diantara keduanya (Tahar & Rachmawati, 2020). Kondisi ini diperburuk oleh adanya asimetri informasi, yaitu kesenjangan informasi antara prinsipal dan agen. Ketika terjadi asimetri informasi, dapat diartikan bahwa salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Dalam hal ini, agen sebagai perwakilan prinsipal dalam mengelola perusahaan memiliki keuntungan dengan informasi yang dimiliki lebih banyak dibandingkan dengan principal (Zoebar & Miftah, 2020). Ketika informasi ini tidak disampaikan sepenuhnya kepada prinsipal, maka akan timbul kesenjangan informasi diantara kedua pihak. Pihak

agen sebagai pemilik informasi yang lebih banyak dapat menggunakan informasi tersebut untuk memenuhi kepentingan mereka terlebih dahulu.

Pemegang saham sebagai prinsipal berfokus pada peningkatan nilai investasi mereka, sedangkan manajemen sebagai agen lebih berorientasi pada kebijakan yang bermanfaat bagi kepentingan pribadi melalui kompensasi finansial serta berbagai ketentuan yang telah disepakati dalam hubungan kedua pihak (Supantiningrum, 2025). Perbedaan kepentingan ini mendorong perusahaan untuk menyelaraskan hubungan kepentingan antara keduanya, salah satunya dengan memberikan bonus berdasarkan laba setelah pajak. Kondisi tersebut membuat manajemen termotivasi untuk memaksimalkan laba perusahaan agar kinerja manajemen terlihat baik di mata pemangku kepentingan (Tahar & Rachmawati, 2020).

Hubungan agensi juga terlihat dalam konteks perpajakan, di mana pemerintah berperan sebagai pemungut pajak (*principal*) dan perusahaan sebagai wajib pajak (*agent*). Dalam hubungan tersebut, potensi konflik kepentingan juga dapat muncul. Pemerintah sebagai pemungut pajak akan berusaha memaksimalkan penerimaan negara, sebaliknya perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak agar laba meningkat (Nadya & Purnamasari, 2021). Manajemen perusahaan sebagai agen dapat melakukan praktik *Tax avoidance* demi meminimalkan beban pajak perusahaan dan mendapatkan insentif dari hal tersebut.

Menurut Manurung et al., (2024), sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *Self Assessment System* memberikan kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Sistem ini memberikan

kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutang, sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk menurunkan penghasilan kena pajak mereka.

Dengan demikian, teori agensi relevan dalam menjelaskan praktik *tax avoidance*, di mana manajemen dapat mengambil keputusan yang dapat menguntungkan diri sendiri maupun perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak perusahaan. Namun, keputusan tersebut berpotensi merugikan stakeholder lain seperti pemerintah dan investor. Kesalahan dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait kebijakan pajak, dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan baik secara finansial maupun dari sisi reputasi di mata publik (Rachmania & Zahra, 2025).

2.1.2. *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Aprina et al., 2025). Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Menurut Ardiana & Dewi (2025), praktik tersebut merupakan strategi yang legal secara hukum, di mana wajib pajak berupaya mengurangi kewajibannya dengan tetap berada dalam batas ketentuan yang berlaku.

Sebagai wajib pajak, perusahaan memiliki tanggung jawab dalam membantu menstabilkan perekonomian negara dan mendukung pembangunan

nasional melalui kontribusi pajak (Putra & Zahroh, 2023). Namun demikian, masih banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance* sebagai upaya untuk menekan biaya operasional dan memaksimalkan laba perusahaan (Putra & Zahroh, 2023). Meskipun dianggap legal, praktik ini tetap berpengaruh terhadap berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Praktik *tax avoidance* dilakukan melalui pengelolaan pajak secara efektif dan efisien guna mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba setelah pajak (Amaliya & Sudarmanto, 2025). Hal ini tidak jarang dilakukan demi mendapatkan keuntungan lebih dalam bentuk kompensasi atau insentif yang tinggi karena dapat menjaga kinerja perusahaan dengan baik. Namun, praktik tersebut juga dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan berupa sanksi administrasi dari otoritas pajak, penurunan harga saham akibat turunnya kepercayaan investor, serta hilangnya reputasi perusahaan di mata masyarakat (Tahar & Rachmawati, 2020).

2.1.3. Intensitas Modal

Intensitas modal menggambarkan besarnya investasi modal yang dialokasikan pada aset tetap (Dewi & Oktaviani, 2022). Indikator ini dapat digunakan sebagai alat ukur yang menunjukkan proporsi aset tetap dalam suatu perusahaan (Manurung et al., 2024). Perusahaan dengan intensitas modal tinggi umumnya mengandalkan aset tetap seperti mesin, peralatan, atau bangunan dalam operasionalnya (Widyastuti et al., 2022). Aset tetap tersebut mengalami penyusutan setiap tahunnya, dan beban penyusutan dari tiap aset tetap perusahaan ini kemudian dapat dijadikan sebagai pengurang laba fiskal perusahaan.

Menurut Suciarti et al., (2020), salah satu biaya yang diperbolehkan sebagai deductible expense adalah penyusutan atas harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Dengan demikian, semakin besar biaya penyusutan yang diakui, maka semakin kecil beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Ishak & Asalam, 2023).

2.1.4. Peningkatan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan peningkatan pendapatan yang terjadi dari tahun ke tahun yang mencerminkan prospek dan tingkat keuntungan perusahaan (Amaliah & Triono, 2024). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka semakin baik perusahaan tersebut dalam menjalankan aktivitas operasinya (Murkana & Putra, 2020). Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi mampu memberikan kontribusi kepada para pemangku kepentingan melalui aktivitas operasionalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan positif dan memiliki kinerja keuangan yang baik (Musyafa'ah et al., 2023).

Ketika pertumbuhan penjualan perusahaan tinggi, maka perusahaan berpotensi memiliki laba yang tinggi. Kondisi tersebut akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* dalam rangka menekan beban pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan (Hendrianto et al., 2022). Dengan demikian, perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang tinggi akan

cenderung menjaga atau meningkatkan kinerja finansialnya melalui efisiensi biaya, termasuk pajak, agar laba setelah pajak yang dilaporkan tetap tinggi dan keuntungan perusahaan dapat dimaksimalkan.

2.1.5. *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility merupakan aspek penting dalam bisnis yang mencerminkan meningkatnya kesadaran akan keterkaitan antara perilaku perusahaan dan kesejahteraan masyarakat (Mkadmi & Ali, 2024). *Corporate Social Responsibility* ini muncul akibat adanya tekanan dari para pemangku kepentingan agar perusahaan memperluas fokus mereka tidak hanya pada profitabilitas, namun juga tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan atas kegiatan operasionalnya (Wulandari & Fanani, 2024).

Menurut Aprina et al., (2025), kegiatan *Corporate Social Responsibility* meliputi berbagai aktivitas sukarela yang dilakukan perusahaan, seperti pemberian sumbangan sosial, pelaksanaan program pendidikan, dan upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, perusahaan yang aktif melakukan CSR dianggap memiliki standar etika yang lebih tinggi dan transparansi yang lebih baik, sehingga citra perusahaan akan terlihat positif di mata masyarakat.

Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan publik untuk melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan CSR dalam laporan tahunan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mewujudkan keberlanjutan bagi perusahaan, komunitas, dan lingkungan (Widianti

& Prasetyo, 2023). Dengan adanya publikasi kegiatan CSR akan meningkatkan pengawasan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Tidak hanya itu, CSR juga memiliki implikasi terhadap kebijakan perusahaan, terutama dalam aspek perpajakan. Beberapa kegiatan CSR dapat mengurangi pajak perusahaan karena biaya yang dikeluarkan untuk CSR dapat menurunkan laba fiskal dan pajak terutang (Susanto & Veronica, 2022). Dengan demikian, kegiatan CSR berpotensi dimanfaatkan sebagai strategi *tax avoidance* sekaligus tameng dari efek negatif praktik *tax avoidance* untuk menjaga citra positif dan memperoleh legitimasi sosial.

2.1.6. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan bentuk kepemilikan saham perusahaan oleh berbagai lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan institusi sejenis lainnya (Sembiring, 2020). Dalam struktur kepemilikan perusahaan, kepemilikan institusional berperan penting dalam pengawasan dan pengendalian manajemen. Menurut Tahar & Rachmawati (2020), investor institusional umumnya memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan strategis dan pengendalian manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan institusional berfungsi untuk meminimalisir konflik keagenan diantara manajer dan pemegang saham (Manurung et al., 2024). Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka akan semakin

kuat pengawasan eksternal terhadap kinerja manajemen, sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan (Safitri & Damayanti, 2021).

Selain itu, tingginya kepemilikan institusional dapat menekan perilaku oportunistik manajer yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan merugikan pemegang saham. Dengan adanya investor institusional, manajemen akan diawasi untuk dalam melakukan pengungkapan agar sesuai regulasi pemerintah serta mengurangi praktik *tax avoidance* (Tahar & Rachmawati, 2020). Investor institusional juga memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa manajemen menempatkan kepentingan pemegang saham sebagai prioritas dalam setiap keputusan dan berperan dalam menurunkan konflik antara pemegang saham dan manajemen (Fatimah & Nurdin, 2024). Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis dapat mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan, meningkatkan kepatuhan dalam perolehan laba, serta mengawasi kebijakan terkait tingkat pajak efektif.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amaliya & Sudarmanto (2025)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> , <i>Corporate Risk</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan institusional sebagai Variabel Moderasi	Independen: <i>Thin Capitalization</i> , <i>Corporate Risk</i> , <i>Sales Growth</i> , Dependen: <i>Tax avoidance</i>	- <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Corporate Risk</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan

Disambung ke halaman berikutnya

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Moderasi: Kepemilikan institusional	Corporate Risk dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional tidak memoderasi hubungan <i>Thin Capitalization</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>
2	Rachmania & Zahra (2025)	Kepemilikan institusional Memoderasi <i>Thin Capitalization</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Independen: <i>Thin Capitalization</i> , <i>Capital Intensity</i> , Ukuran Perusahaan Dependen: <i>Tax avoidance</i> Moderasi: Kepemilikan institusional	- <i>Thin Capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi <i>Thin Capitalization</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Kepemilikan institusional dapat memoderasi <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>
3	Andrilia & Setiyawati (2025)	<i>Business Strategy</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Tax Avoidance: Good Corporate Governance as a Moderator</i>	Independen: Business Strategy, <i>Capital Intensity</i> Dependen: <i>Tax avoidance</i> Moderasi: Good Corporate Governance	- Business strategy tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . - Good corporate governance tidak memoderasi hubungan business strategy dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4	Fitri & Hakim (2024)	<i>Does Institutional Ownership Moderate the Effect of Transfer Pricing and Sales Growth on Tax Avoidance?</i>	Independen: <i>Sales Growth</i> , <i>Transfer Pricing</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: <i>Institutional Ownership</i>	- <i>Sales Growth</i> dan <i>Institutional Ownership</i> berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> - <i>Transfer Pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Institutional Ownership</i> memperlemah hubungan <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Disambung ke halaman berikutnya

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				- <i>Institutional Ownership</i> memperkuat hubungan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>
5	Amaliah & Triono (2024)	Kepemilikan institusional Sebagai Faktor Moderasi <i>Sales Growth</i> , Transfer Pricing Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Independen: <i>Sales Growth</i> , <i>Transfer Pricing</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: Kepemilikan institusional	- <i>Sales Growth</i> dan <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Kepemilikan Intitusional dapat memoderasi pengaruh <i>Sales Growth</i> dan Tranfer Pricing terhadap <i>Tax Avoidance</i>
6	Fatimah & Nurdin (2024)	<i>The Role of Institutional Ownership as A Moderating Variable in Determining Disclosure of Tax Avoidance (Mining Sector Companies 2018-2022)</i>	Independen: <i>Profitability</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Company Size</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: <i>Institutional Ownership</i>	- <i>Profitability</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Company Size</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Institutional Ownership</i> tidak memoderasi hubungan <i>Profitability</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Institutional Ownership</i> memperlemah hubungan <i>Company Size</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>
7	Manurung et al., (2024)	Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> Dengan Kepemilikan institusional Sebagai Variabel Moderasi	Independen: <i>Firm Size</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: Kepemilikan institusional	- <i>Firm Size</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan <i>Capital Intensity</i> dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Kepemilikan institusional tidak memoderasi hubungan <i>Firm Size</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Disambung ke halaman berikutnya

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8	Wulandari & Fanani (2024)	<i>Corporate Social Responsibility (CSR) and Tax Avoidance (TA) in Indonesia : Moderated Audit Committee Characteristics</i>	Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: <i>Audit Committee</i>	- <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> <i>Audit Committee</i> tidak memoderasi hubungan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>
9	Mkadmi & Ali (2024)	<i>How does Tax Avoidance affect Corporate Social Responsibility and financial ratio in emerging economies?</i>	Independen: <i>Corporate Social Responsibility, Profitability (ROE), Leverage, Liquidity Ratio, Activity Ratio, Growth Ratio</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	- <i>Corporate Social Responsibility</i> , dan liquidity ratio berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Profitability, dan activity ratio berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Leverage ratio dan growth ratio tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
10	Paembonan et al., (2024)	<i>The Influence Between Corporate Social Responsibility and Political Connections on Tax Aggressivity through Institutional Ownership As A Moderation Variable</i>	Independen: <i>Corporate Social Responsibility dan Political Connections</i> Dependen: <i>Tax Aggressivity</i> Moderasi: <i>Institutional Ownership</i>	- Kualitas dan Kuantitas CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak - Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak - Kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan CSR dan Koneksi Politik terhadap agresivitas pajak
11	Agustyo & Arianti (2024)	<i>Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak</i>	Independen: <i>Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, dan Capital Intensity</i> Dependen: <i>Penghindaran Pajak</i>	- CSR dan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak - Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak
12	Dyah et al., (2023)	<i>Do Corporate Social Responsibility and Corporate Governance</i>	Independen: <i>Corporate Social</i>	- <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif

Disambung ke halaman berikutnya

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Disclosures Affect Tax Avoidance?</i>	<i>Responsibility dan Corporate Governance</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	terhadap <i>Tax Avoidance</i> Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
13	Musyafa'ah et al., (2023)	<i>Tax Avoidance: Employment Benefits Liability, Sales Growth, Capital Intensity, Profit Management, And Inventory Intensity</i>	Independen: Kewajiban Imbalan Kerja, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Manajemen Laba, Intensitas Persediaan Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	- Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Intensitas Persediaan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> Kewajiban Imbalan Kerja, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
14	Hermi & Petrawati (2023)	<i>The Effect Of Management Compensation, Thin Capitalization and Sales Growth on Tax Avoidance with Institutional Ownership as Moderation</i>	Independen: <i>Management Compensation, Thin Capitalization, Sales Growth</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: <i>Institutional Ownership</i>	- Kompensasi Manajemen dan <i>Thin Capitalization</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Kepemilikan Institusional memperlemah pengaruh positif ketiga variabel
15	Ristanti (2022)	<i>Corpporate Social Responsibility, Capital Intensity, Kualitas Audit dan Tax Avoidance: Kepemilikan institusional Sebagai Variabel Moderasi</i>	Independen: <i>Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Kualitas Audit</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: Kepemilikan institusional	- <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Kepemilikan institusional tidak memoderasi hubungan <i>Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Kualitas Audit</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Disambung ke halaman berikutnya

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
16	Widyastuti et al., (2022)	<i>The Effect Of Leverage, Profitability, Capital Intensity And Corporate Governance On Tax Avoidance</i>	Independen: <i>Leverage, Profitability, Corporate Governance, Capital Intensity</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	- Leverage dan profitability berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Board of Commissioners</i> dan <i>Audit Committee</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i>
17	Juliana & Stiawan (2022)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing</i> Dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Independen: <i>Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing</i> Dan Koneksi Politik Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	CSR tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dan Koneksi Politik berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
18	Hendrianto et al., (2022)	Pengaruh <i>Sales Growth, Capital Intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Independen: <i>Sales Growth, Capital Intensity, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Manajerial</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	- <i>Sales Growth</i> dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> Kompensasi Eksekutif dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
19	Safitri & Damayanti (2021)	<i>Sales Growth</i> dan <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan institusional Sebagai Variabel Pemoderasi	Independen: <i>Sales Growth</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Moderasi: Kepemilikan institusional	- <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> Kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>
20	Zoebar & Miftah (2020)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Capital Intensity</i> Dan Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Independen: <i>CSR, Capital Intensity, dan Kualitas Audit</i> Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	- CSR berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> Kualitas Audit tidak berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Sumber: Hasil review beberapa penelitian, 2025

2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dibangun atas dasar teori agensi Jensen et al., (1976) yang menjelaskan hubungan kontraktual diantara prinsipal dan agen. Dalam konteks perusahaan, manajemen (*agent*) akan bertindak sebagai perwakilan pihak pemangku kepentingan (*principal*) dalam mengelola perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait perusahaan. Namun kepentingan kedua pihak tidak selalu selaras yang akhirnya menciptakan konflik kepentingan yang memengaruhi pengambilan keputusan, termasuk mengenai strategi perpajakan. Untuk menyelaraskan kepentingan kedua pihak, perusahaan dapat memberikan bonus manajerial dari laba setelah pajak. Cara ini dapat memotivasi manajemen untuk meminimalkan beban pajak agar memperoleh bonus lebih besar.

Dalam konteks perpajakan, konflik kepentingan juga terjadi di mana pemerintah berperan sebagai pemungut pajak (*principal*) dan perusahaan sebagai wajib pajak (*agent*) memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak negara, sedangkan perusahaan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, praktik *tax avoidance* dapat muncul sebagai strategi manajemen untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Intensitas modal menjadi salah satu faktor yang berperan dalam strategi *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi memiliki aset tetap yang besar sehingga biaya penyusutannya juga tinggi. Biaya penyusutan ini

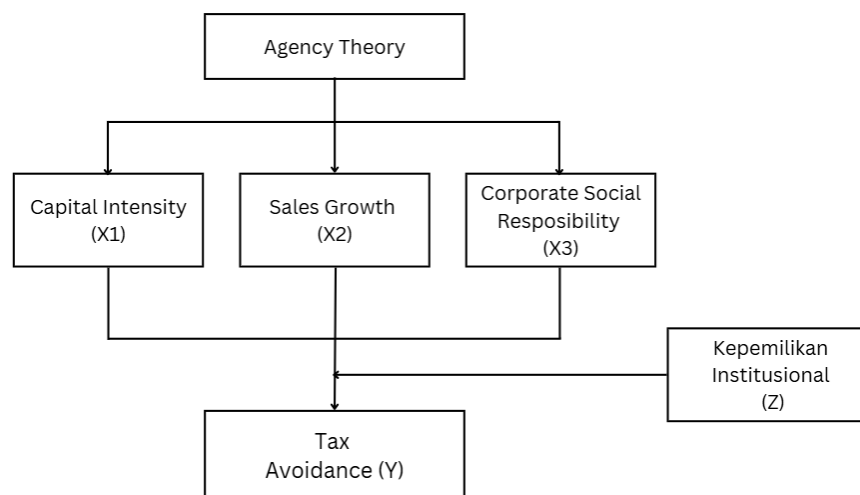
dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak yang akhirnya meminimalkan beban pajak perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas modal, maka semakin tinggi potensi perusahaan melakukan *tax avoidance*. Selain itu, pertumbuhan penjualan yang tinggi juga akan menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini karena pertumbuhan penjualan yang tinggi akan meningkatkan laba perusahaan, sehingga beban pajak ikut meningkat. Oleh karena itu, semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka potensi perusahaan melakukan *tax avoidance* akan meningkat.

Faktor lain yang berpengaruh adalah *Corporate Social Responsibility*. Cara pandang perusahaan terhadap kegiatan CSR berdampak pada pengambilan keputusan terkait strategi perpajakan perusahaan. Perusahaan dengan komitmen tinggi terhadap CSR cenderung menghindari praktik *tax avoidance* karena tindakan tersebut dapat menurunkan reputasi dan kepercayaan publik. Namun, di sisi lain, kegiatan CSR juga dapat digunakan sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak. Dengan demikian, CSR dapat berfungsi sebagai penghalang maupun sebagai sarana perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Lalu, kepemilikan institusional dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi yang berpotensi memoderasi pengaruh dari intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan CSR terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Investor institusional dapat mengawasi kinerja manajemen keputusan strategis perusahaan dilakukan secara efisien dan sesuai peraturan yang berlaku. Namun, investor institusional juga dapat

mendorong manajemen melakukan *tax avoidance* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang terdiri dari intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan CSR sebagai variabel independen, *tax avoidance* sebagai variabel dependen, dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Kerangka ini mengilustrasikan bagaimana masing-masing faktor dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*, serta bagaimana mekanisme tata kelola dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Dikembangkan dalam penelitian ini

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi, perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan *tax avoidance* karena

manajemen sebagai agen memiliki fleksibilitas dalam mengelola aset tetap yang besar. Beban penyusutan aset tetap dapat digunakan secara legal untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan karena termasuk *deductible expense*. Fleksibilitas manajemen ini muncul karena pengelolaan aset tetap yang kompleks menimbulkan kesenjangan informasi antara manajemen dan para pemangku kepentingan lainnya (*principal*), sehingga manajemen lebih leluasa menerapkan strategi *tax avoidance*. Manajemen juga dapat termotivasi untuk melakukan *tax avoidance* karena peningkatan laba akibat penghematan pajak dapat memengaruhi penilaian kinerja dan bonus yang mereka terima.

Asumsi ini diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Widyastuti et al., (2022) dan Andrilia & Setiyawati (2025) yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap tingkat *tax avoidance* perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi intensitas modal perusahaan, maka potensi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* akan semakin besar. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* Pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.2. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi, peningkatan pertumbuhan penjualan dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini karena manajemen sebagai agen akan berusaha menampilkan kinerja keuangan yang

optimal guna memperoleh bonus, mempertahankan posisi, atau mendapatkan penilaian positif dari pemilik perusahaan (*principal*). Pertumbuhan penjualan yang tinggi menandakan performa perusahaan yang baik dalam menghasilkan pendapatan, namun kondisi ini juga diikuti oleh peningkatan beban pajak yang berpotensi mengurangi laba setelah pajak perusahaan. Hal ini dapat berdampak pada evaluasi kinerja manajemen maupun potensi bonus yang akan mereka terima. Untuk memaksimalkan laba setelah pajak, manajemen akan mencoba melakukan praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, pertumbuhan penjualan menciptakan tekanan bagi manajemen untuk mengambil keputusan oportunistik dalam mengelola beban pajak perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya juga mendukung asumsi ini. Penelitian oleh Safitri & Damayanti (2021) dan Amaliya & Sudarmanto (2025) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka potensi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* akan semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* Pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.3. Pengaruh CSR Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi, keterlibatan perusahaan dalam aktivitas CSR dapat menekan perilaku oportunistik manajemen dalam mengurangi beban pajak secara agresif. Hal ini karena perusahaan yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial biasanya memiliki kepedulian terhadap etika bisnis dan keberlanjutan jangka panjang yang selaras dengan kepentingan investor sebagai *principal*. Selain itu, perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR cenderung memandang pembayaran pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka terhadap negara dan masyarakat, sehingga manajemen tidak hanya berfokus untuk memaksimalkan laba, namun juga mempertimbangkan reputasi perusahaan dan dampak sosial dari setiap keputusan, termasuk strategi perpajakan. CSR juga mendorong manajemen untuk memberikan informasi yang lebih transparan kepada publik, sehingga ruang bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik seperti menghindari pajak untuk memaksimalkan kinerja mereka menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, CSR berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan *principal* serta menekan praktik *tax avoidance* dalam perusahaan.

Hasil penelitian Mkadmi & Ali (2024), Ristanti (2022), serta Zoebar & Miftah (2020) yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* turut mendukung asumsi ini. Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat keterlibatan perusahaan dalam CSR, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H3: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* Pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.4. Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi antara Intensitas Modal dan *Tax Avoidance*

Teori agensi menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena beban depresiasi aset tetap yang besar. Beban depresiasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak, sehingga menciptakan kesempatan manajemen untuk bertindak oportunistik. Namun, kepemilikan institusional berpotensi memengaruhi sejauh mana manajemen memanfaatkan intensitas modal dalam praktik ini. Hal ini karena investor institusional berperan sebagai pengawas yang mampu menekan tindakan oportunistik manajemen, termasuk dalam praktik *tax avoidance* yang berisiko bagi reputasi perusahaan.

Ketika proporsi kepemilikan institusional tinggi, investor institusional memiliki kekuatan untuk mendorong manajemen agar lebih bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan keuangan, termasuk dalam strategi perpajakan perusahaan. Dengan demikian, kepemilikan institusional diasumsikan dapat memperlemah hubungan positif antara intensitas modal dan *tax avoidance*. Hal ini diperkuat oleh temuan Manurung et al., (2024), yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat memperlemah hubungan intensitas modal terhadap

tax avoidance, sehingga menurunkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap *Tax Avoidance* Pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.5. Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi antara Pertumbuhan Penjualan dan *Tax Avoidance*

Dalam teori agensi, pertumbuhan penjualan mendorong manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* untuk tetap mempertahankan laba bersih agar kinerja keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Pertumbuhan penjualan mencerminkan peningkatan kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Namun, dengan meningkatnya laba perusahaan akan berdampak pada peningkatan beban pajak yang harus ditanggung. Oleh karena itu, manajemen sebagai agen akan berupaya meminimalkan beban pajak agar laba tetap tinggi dan kinerja mereka terlihat baik.

Sementara itu, kepemilikan institusional sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan berperan dalam memoderasi hubungan antara pertumbuhan penjualan dan *tax avoidance*. Investor institusional akan menjadi pengawas terhadap kinerja manajemen dalam menjalankan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan memiliki pengawasan yang lebih ketat terhadap manajemen. Kondisi ini membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama terkait strategi

perpajakan agar tidak menimbulkan risiko hukum maupun reputasi bagi perusahaan. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat mengurangi kecenderungan manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Amaliah & Triono (2024), Manurung et al., (2024), dan Safitri & Damayanti (2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memainkan peran dalam mengontrol praktik *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *Tax Avoidance* Pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.6. Kepemilikan institusional sebagai Moderasi antara CSR dan *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi, konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat diminimalkan melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Salah satu bentuk pengawasan tersebut yaitu kepemilikan institusional, di mana investor institusional memiliki kemampuan untuk mengawasi tindakan manajemen agar tetap sejalan dengan kepentingan para pemegang saham dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam konteks CSR, kepemilikan institusional dapat memperkuat komitmen etis perusahaan terhadap kepatuhan hukum, termasuk dalam urusan perpajakan.

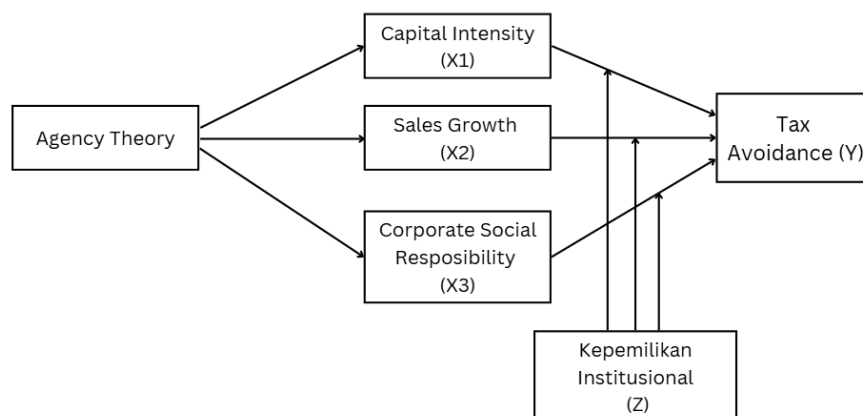
Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dapat memperkuat fungsi kontrol terhadap perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam praktik *tax*

avoidance. Ketika kepemilikan institusional rendah, manajemen akan lebih leluasa untuk menggunakan CSR sebagai sarana menutupi praktik *tax avoidance* dan menjaga reputasi perusahaan agar tetap terlihat positif di mata publik. Sebaliknya, perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengawasi manajemen dengan lebih ketat sehingga potensi penyalahgunaan CSR akan menurun. Oleh karena itu, dengan adanya pengawasan yang kuat dari investor institusional, efek CSR dalam menekan *tax avoidance* akan semakin kuat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paembonan et al., (2024) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh CSR terhadap Tax Avoidance Pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan hipotesis di atas maka disusun model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model Penelitian

Sumber: Dikembangkan dalam penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional

3.1.1. Variabel Dependen

Tax avoidance merupakan suatu strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Praktik ini masih dianggap legal karena memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yang merupakan rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Pemilihan ini didasarkan pada kemampuan ETR untuk menggambarkan sejauh mana perusahaan melakukan efisiensi pajak. Semakin rendah nilai ETR, maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Penggunaan rumus ini sebagai ukuran *tax avoidance* telah banyak digunakan dalam penelitian terdahulu, termasuk oleh Rachmania & Zahra (2025) yang juga mengadopsi pendekatan ini.

Berdasarkan PSAK No 46 Revisi 2015 mengenai Pajak Penghasilan, beban pajak merupakan jumlah penghasilan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penentuan laba rugi pada suatu periode. Ketentuan ini menjadi menarik karena tarif pajak yang berlaku (*statutory tax rate*) menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) untuk setiap perusahaan dengan omset lebih dari 50 milyar ditetapkan sebesar 25% (Adnyana et al., 2024). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai $ETR \leq 25\%$ menunjukkan bahwa

perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk efisiensi pembayaran pajak. Sebaliknya, apabila nilai ETR mendekati atau mencapai 25% mengindikasikan bahwa perusahaan telah efektif dalam pengelolaan beban pajak. Namun, apabila nilai $ETR > 25\%$ menunjukkan perusahaan tidak mampu memanfaatkan sumber daya untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak sehingga efektivitas tarif pajak tidak tercapai. Dalam hubungan antara tax avoidance dengan ETR, nilai $ETR \leq 25\%$ menunjukkan perusahaan terindikasi melakukan tax avoidance, sedangkan nilai $ETR > 25\%$ mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan tax avoidance.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots 3.1$$

Sumber: Rachmania & Zahra (2025)

3.1.2. Variabel Moderasi

Kepemilikan institusional merupakan besaran saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau entitas yang dapat memengaruhi kebijakan perusahaan seperti bank, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki investor institusional terhadap total saham yang beredar. Rumus ini menunjukkan tingkat keterlibatan langsung dengan kepemilikan institusi yang dapat memengaruhi keputusan manajemen terkait kebijakan perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin tinggi tingkat pengawasan investor institusional terhadap manajemen perusahaan,

termasuk juga dalam strategi perpajakan. Penggunaan rumus ini juga telah diterapkan dalam penelitian terdahulu seperti (Rachmania & Zahra, 2025).

$$\frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \dots\dots\dots 3.2$$

Sumber: Rachmania & Zahra (2025)

3.1.3. Variabel Independen

3.1.3.1. Intensitas Modal

Intensitas modal merupakan ukuran yang menunjukkan proporsi aset tetap dalam keseluruhan aset perusahaan. Semakin tinggi intensitas modal, maka semakin besar penggunaan aset tetap seperti mesin, Gedung, dan peralatan dalam kegiatan operasional perusahaan. Aset tetap ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan kebijakan fiskal berupa beban penyusutan sebagai pengurang laba fiskal. Dengan demikian, beban pajak yang harus ditanggung dapat diminimalisir. Oleh karena itu, intensitas modal diasumsikan memiliki hubungan dengan strategi *tax avoidance*, karena perusahaan berpotensi menggunakan beban penyusutan sebagai instrument efisiensi pajak. Konsep ini telah dikaji dalam berbagai penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Rachmania & Zahra (2025) di mana rasio aset tetap terhadap total aset digunakan untuk mengukur tingkat intensitas modal perusahaan.

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots 3.3$$

Sumber: Rachmania & Zahra (2025)

3.1.3.2. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan atau *sales growth* adalah peningkatan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Variabel ini menunjukkan kinerja operasional perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan menggambarkan pertumbuhan bisnis secara umum. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung diekspektasikan diikuti dengan kenaikan jumlah laba. Hal ini kemudian akan berdampak kepada peningkatan beban pajak perusahaan. Akibatnya, perusahaan mungkin akan terdorong untuk melakukan praktik *tax avoidance* untuk menjaga profitabilitas perusahaan. Oleh sebab itu, variabel ini penting dalam mengukur hubungan antara pertumbuhan kinerja keuangan dan kebijakan perpajakan perusahaan. Rumus untuk mengukur pertumbuhan penjualan mengacu pada penelitian terdahulu (Amaliah & Triono, 2024).

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan Tahun Ini} - \text{Penjualan Tahun Lalu}}{\text{Penjualan Tahun Lalu}} \dots\dots\dots 3.4$$

Sumber: Amaliah & Triono (2024)

3.1.3.3. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dalam penelitian ini, CSR diukur menggunakan pengeluaran aktual perusahaan untuk kegiatan CSR yang dilaporkan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Pengeluaran CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari strategi

keberlanjutan perusahaan. Pengeluaran CSR ini digunakan sebagai indikator kuantitatif untuk menilai tingkat keterlibatan sosial perusahaan berdasarkan besarnya dana yang dialokasikan untuk kegiatan CSR yang bersumber dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan. Logaritma natural kemudian digunakan untuk menormalkan distribusi data agar lebih mudah untuk membandingkan nilai antarperusahaan. Perusahaan dengan pengeluaran CSR yang tinggi umumnya dianggap memiliki komitmen yang tinggi terhadap tanggung jawab sosialnya. Namun, pengeluaran tersebut juga dapat digunakan manajemen sebagai strategi untuk memperoleh legitimasi dan menutupi praktik *tax avoidance* (Susanto & Veronica, 2022).

Penggunaan indikator ini juga telah diterapkan dalam penelitian terdahulu oleh Mkadmi & Ali (2024) yang mengukur CSR berdasarkan besarnya pengeluaran yang dicatat dalam laporan keuangan perusahaan

$$CSR_{it} = \ln(\text{Total Pengeluaran } CSR_{it}) \dots\dots\dots 3.5$$

Sumber: Mkadmi & Ali (2024)

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2024. Sub sektor ini termasuk ke dalam sektor *Consumer Non-Cyclicals* dan bergerak dalam produksi serta distribusi produk makanan dan minuman. Jumlah perusahaan yang termasuk ke dalam populasi ini adalah 70

perusahaan yang secara konsisten terdaftar dalam sub-sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024.

3.2.2. Sampel

Pemilihan sampel dalam penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti agar data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021-2024.
2. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tidak konsisten menyajikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan selama periode 2021-2024.
3. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang menggunakan mata uang asing dalam laporan keuangan selama periode 2021-2024
4. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang mengalami kerugian selama periode 2021-2024.
5. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tidak memiliki data lengkap mengenai variabel yang dibutuhkan dalam penelitian

Tabel 3.1 Hasil Pemilihan Sampel

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021-2024	70
2	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tidak konsisten menyajikan laporan keuangan selama periode 2021-2024	(3)

3	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang menggunakan mata uang asing dalam laporan keuangan selama periode 2021-2024	(3)
4	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang mengalami kerugian selama periode 2021-2024	(21)
5	Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang tidak memiliki data lengkap mengenai variabel yang dibutuhkan dalam penelitian (data kepemilikan institusional dan biaya CSR)	(13)
Total perusahaan yang menjadi sample penelitian		30
Total data observasi selama 4 tahun (30 x 4)		120

Sumber: Data Diolah, 2025

Dari kriteria *purposive sampling* yang telah ditetapkan, diperoleh 30 sampel data dari perusahaan sub-sektor makanan dan minuman selama 4 tahun mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2024, sehingga total data observasi yang digunakan adalah 120 data.

Tabel 3.2 Sampel Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2	ADES	Akasha Wira International Tbk.
3	BISI	Bisi International Tbk.
4	BOBA	Formosa Ingridient Factory Tbk.
5	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.
6	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
7	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
8	CMRY	Cisarua Mountain Dairy Tbk.
9	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
10	CPRO	Central Proteina Prima Tbk.
11	CSRA	Cisadane Sawit Raya Tbk.
12	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.
13	FAPA	FAP Agri Tbk.
14	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
15	IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk.
16	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
17	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk.

Disambung ke halaman berikutnya

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
18	MAIN	Malindo Feedmill Tbk.
19	MYOR	Mayora Indah Tbk.
20	PGUN	Pradiksi Gunatama Tbk.
21	PSGO	Palma Serasih Tbk.
22	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.
23	SKLT	Sekar Laut Tbk.
24	SMAR	SMART Tbk.
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
26	TAPG	Triputra Agro Persada Tbk.
27	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk.
28	TGKA	Tigakarsa Satria Tbk.
29	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk.
30	UNSP	Bakrie Sumatera Plantations Tbk.

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2025

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersifat sekunder. Data kuantitatif merujuk pada informasi numerik yang dapat dianalisis secara statistik, sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak ketiga atau sumber yang telah tersedia sebelumnya. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang diunduh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan laman resmi masing-masing perusahaan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu memperoleh data yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen yang tersedia secara publik. Data yang dikumpulkan meliputi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan sub-sektor makanan dan minuman selama periode 2021-2024 yang diakses melalui situs resmi perusahaan maupun situs BEI (www.idx.co.id). Proses

dokumentasi dilakukan secara sistematis dengan mencatat, mengarsipkan, dan mengolah informasi yang relevan dengan variabel penelitian.

3.5. Alat Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 27. SPSS digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam model penelitian serta untuk menganalisis pengaruh variabel moderasi. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan CSR terhadap *tax avoidance*. Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik guna memastikan kelayakan model regresi meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Ghozali (2021), statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik data seperti nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, total (*sum*), jangkauan (*range*), kurtosis, dan *skewness* dari setiap variabel penelitian. Hasil dari statistik deskriptif ini membantu peneliti dalam memahami sebaran data penelitian.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi dalam penelitian memenuhi ketentuan dan tidak mengalami penyimpangan asumsi klasik (Ghozali, 2018). Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi dasar regresi sehingga hasil analisis regresi layak digunakan. Terdapat empat jenis uji klasik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

3.5.2.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021), uji normalitas digunakan untuk menilai apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas residual dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika nilai signifikansi pada uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05, maka data residual dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 0,05 maka data residual dapat dianggap tidak berdistribusi normal.

3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi (Ghozali, 2021). Apabila varians dari residual model regresi bersifat konstan atau tetap maka kondisi tersebut disebut homoskedastisitas. Namun, apabila variansnya berubah-

ubah maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik harus memenuhi asumsi homoskedastisitas.

3.5.2.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2021). Model regresi dianggap baik apabila tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* menunjukkan seberapa besar variasi suatu variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya (Ghozali, 2018). Multikolinearitas ditandai dengan nilai *tolerance* yang rendah dan nilai VIF yang tinggi. Umumnya, multikolinearitas dianggap terjadi apabila nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 .

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual satu dengan residual pada periode sebelumnya dalam model regresi (Ghozali, 2021). Autokorelasi umumnya muncul pada data *time series* karena gangguan pada satu individu atau kelompok dalam satu periode dapat memengaruhi periode berikutnya. Sedangkan, pada data *cross-section* hal ini jarang terjadi karena setiap observasi berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Ketika residual tidak saling bebas antarperiode maka model regresi dianggap mengalami

autokorelasi. Apabila model regresi mengalami autokorelasi, maka keadaan tersebut dapat mengganggu ketepatan hasil regresi.

3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance* secara parsial (individu) maupun secara simultan (keseluruhan). Model regresi ini bertujuan untuk mengetahui arah serta tingkat signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots 3.6$$

Keterangan:

Y	=	<i>Tax avoidance</i>
α	=	Konstanta
X_1	=	<i>Capital Intensity</i>
X_2	=	<i>Sales Growth</i>
X_3	=	<i>Corporate Social Responsibility</i>
β_{1-3}	=	Koefisien Regresi
e	=	<i>Error Term</i>

3.5.4. Moderated Regression Analysis (MRA)

Untuk menguji peran Kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi, digunakan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Dalam analisis ini,

peran Kepemilikan institusional sebagai moderator dalam hubungan antara intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan CSR terhadap *tax avoidance* di uji untuk melihat apakah variabel Kepemilikan institusional dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dibentuk variabel interaksi antara Kepemilikan institusional dengan masing-masing variabel independen. Model regresi moderasi dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 (X_1 * Z) + \beta_6 (X_2 * Z) + \beta_7 (X_3 * Z) + e \dots 3.7$$

Keterangan:

Y	=	<i>Tax avoidance</i>
α	=	Konstanta
X_1	=	<i>Capital Intensity</i>
X_2	=	<i>Sales Growth</i>
X_3	=	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Z	=	Kepemilikan institusional
$X_1 * Z$	=	Interaksi <i>Capital Intensity</i> dan Kepemilikan institusional
$X_2 * Z$	=	Interaksi <i>Sales Growth</i> dan Kepemilikan institusional
$X_3 * Z$	=	Interaksi CSR dan Kepemilikan institusional
β_{1-7}	=	Koefisien Regresi Setiap Variabel
e	=	<i>Error Term</i>

3.5.5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen dan variabel moderasi terhadap variabel

dependen. Tiga jenis uji yang akan digunakan meliputi uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R^2), yang semuanya menggunakan tingkat signifikansi 0,05.

3.5.5.1. Uji Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (Ghozali, 2021). Dalam penelitian ini, uji t dilakukan untuk menunjukkan pengaruh masing-masing variabel secara parsial terhadap *tax avoidance*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Hipotesis akan diterima apabila nilai sig < 0,05, yang berarti secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan, hipotesis akan ditolak apabila nilai sig > 0,05, yang berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.5.2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Berbeda dengan uji t yang menguji setiap koefisien regresi secara individual, uji F menguji hipotesis secara keseluruhan. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig F < 0,05), maka model regresi secara simultan dinyatakan signifikan, yang berarti seluruh variabel independen

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

2. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\text{sig } F > 0,05$), maka model regresi secara simultan dinyatakan tidak signifikan, yang berarti variabel independen bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sehingga model regresi tidak layak untuk digunakan.

3.5.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen melalui variabel independen (Ghozali, 2021). Nilai R^2 yang tinggi (mendekati 1) menunjukkan bahwa model mampu memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen, sehingga model dianggap baik dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. M. W. A., Purnamawati, I. G. A., & Sujana, E. (2024). Determinan Tarif Pajak Efektif Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 15(01), 143–155.
<https://doi.org/10.23887/jimat.V15I01.61581>
- Agustyo, B. A., & Arianti, B. F. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3168>
- Amaliah, I., & Triono, H. (2024). Kepemilikan Institusional Sebagai Faktor Moderasi Sales Growth, Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 5(1), 77–91. <https://doi.org/10.31949/jaksi.V5I1.8357>
- Amaliya, V., & Sudarmanto, E. (2025). Pengaruh Thin Capitalization, Corporate Risk dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 2474–2483. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2350>
- Andrilia, M., & Setiyawati, H. (2025). Business Strategy, Capital Intensity, Tax Avoidance: Good Corporate Governance as a Moderator. *Jurnal Akuntansi*, 29(3), 426–445.
<https://doi.org/10.24912/JA.V29I3.2755>
- Aprina, A., Wahyudi, T., & Sukanto, S. (2025). The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) And Company Size on Tax Avoidance (Case Study of Companies in All Sectors Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2019-2023). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 8(2), 5043–5057.
<https://doi.org/10.31538/ijse.V8I2.6524>
- Ardiana, S. N., & Dewi, I. P. (2025). Tax Avoidance: Capital and Inventory Intensity in BEI Non-Cyclicals (2019-2023). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 8(1), 8728–8741. <https://doi.org/10.31538/ijse.V8I3.7483>
- Badan Pusat Statistik. (2024, January 24). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2024*.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2022). Mampukah Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance? *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(1), 76–87. <https://doi.org/10.22219/jaa.V5I1.18358>
- Fatimah, N., & Nurdin, F. (2024). The Role of Institutional Ownership as A Moderating Variable in Determining Disclosure of Tax Avoidance (Mining Sector Companies 2018-2022). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22(1), 1–14.
<https://doi.org/10.24167/jab.V22I1.11181>

- Fitri, E. N., & Hakim, D. R. (2024). Does Institutional Ownership Moderate the Effect of Transfer Pricing and Sales Growth on Tax Avoidance? *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 16(2), 114–132. <https://doi.org/10.15294/jda.V16I2.5697>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendrianto, A. J., Suropto, Effriyanti, & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth, Capital intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3188–3199. <https://doi.org/10.33395/owner.V6I3.1054>
- Hermi, H., & Petrawati, P. (2023). The Effect Of Management Compensation, Thin Capitalization And Sales Growth On Tax Avoidance With Institutional Ownership As Moderation. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(1), 1–14. <https://doi.org/10.25105/mraai.V23I1.16790>
- Ishak, A. C., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 2041–3051. <https://doi.org/10.33395/owner.V7I4.1720>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 4, 305–360. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Juliana, D., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 283–291. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.V1I3.804>
- Komalasari, L., & Suharna. (2024). Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan | E-ISSN : 3063-8208*, 1(2), 104–110. <https://doi.org/10.62379/jakp.V1I2.75>
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan Lawsuit*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.V1I2.5552>
- Manurung, C. B. A., Ratnawati, V., & Nasir, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1985–1995. <https://doi.org/10.33395/owner.V8I2.2334>

- Matitaputty, J. S., & Ramadhan, R. G. (2023). Financial Distress, Profitability, Capital Intensity and Tax Avoidance. *Soedirman Accounting Review : Journal of Accounting and Business*, 8(1), 32–42. <https://doi.org/10.32424/1.sar.2023.8.1.8246>
- Mkadmi, J. E., & Ali, W. Ben. (2024). How does tax avoidance affect corporate social responsibility and financial ratio in emerging economies? *Journal of Economic Criminology*, 5, 100070. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100070>
- Murkana, R., & Putra, Y. M. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(1), 43–57. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13.01.004>
- Musyafa'ah, M., Budiman, N. A. *, & Delima, Z. M. (2023). Tax Avoidance: Employment Benefits Liability, Sales Growth, Capital Intensity, Profit Management, And Inventory Intensity. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(2), 200–218. <https://doi.org/10.46367/jas.V7I2.1452>
- Nabila, N., & Aryani, Y. A. (2025). Factors Influencing Tax Avoidance in Non-Financial Multinational Companies in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 8(1), 678–696. <https://doi.org/10.31538/iijs.v8i1.5784>
- Nadya, B., & Purnamasari, D. (2021). The Effect of Sales Growth and Leverage on Tax Avoidance Empirical Study of Coal Sub-Sector Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 5(2), 89. <https://doi.org/10.32486/aksi.V5I2.23>
- Paembonan, E., Saraswati, E., & Iqbal, S. (2024). The Influence Between Corporate Social Responsibility and Political Connections on Tax Aggressivity through Institutional Ownership As A Moderation Variable. *Quantitative Economics and Management Studies*, 5(1), 82–90. <https://doi.org/10.35877/454RI.qems2237>
- Putra, A. S., & Zahroh, F. (2023). Analisis Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 257–272. <https://doi.org/10.22219/jaa.V6I2.26421>
- Putri, A. S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Nilai Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 11–19. <https://doi.org/10.37058/jak.v18i1.6707>
- Putri, N. L., Dewi, H., Putu, I., Diatmika, G., Made, I., & Adiputra, P. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(11), 6956–6974. <https://doi.org/10.36418/syxtax-literate.V9I11.17218>

- Rachmania, D., & Zahra, A. A. (2025). Kepemilikan Institusional Memoderasi Thin Capitalization, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 2333–2340. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2324>
- Ramadhani, N., & Jamaluddin, J. (2025). The Influence of Corporate Social Responsibility (CSR), Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 5(1), 1733–1744. <https://doi.org/10.55927/ijba.V5I1.12618>
- Ristanti, L. (2022). Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Kualitas Audit Dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 50–62. <https://doi.org/10.55587/jla.V2I1.22>
- Rohendi, E., & Darsita, I. (2022). The Effect of Corporate Governance and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 142–162. <https://doi.org/10.55927/jambak.V1I2.928>
- Safitri, N., & Damayanti, T. W. (2021). Sales Growth dan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 175–216. <https://doi.org/10.24246/persi.V4I2.P175-216>
- Sembiring, Y. C. B. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 91–100. <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/1186>
- Sigalingging, A. Y., Ismail, M., & Manalu, H. M. (2025). Pengaruh Green Innovation, Penghindaran Pajak Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2023). *Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 3(1), 221–239. <https://doi.org/10.70437/benefit.V3I1.1112>
- Supantiningrum, Rr. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan: Perspektif Kebijakan Dividen, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2023). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 117–139. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.V4I2.3798>
- Susanto, A., & Veronica, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 541–553. <https://doi.org/10.33395/owner.V6I1.551>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kompartemen.V18I1.6342>

- Tutupoho, M., Sirat, A. H., & Taslim, F. A. (2023). The Effect Of Good Corporate Governance, Sales Growth, And Capital Intensity On Tax Avoidance In Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange (IDX) In 2019-2021. *Journal of Management and Islamic Finance*, 3(2), 184–198. <https://doi.org/10.22515/jmif.V3I2.7237>
- Widianti, F. D. A., & Prasetyo, A. B. (2023). Do Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Disclosures Affect Tax Avoidance? *Accounting Analysis Journal*, 12(3), 165–176. <https://doi.org/10.15294/aaj.V12I3.70867>
- Widyastuti, S. M., Meutia, I., & Candrakanta, A. B. (2022). The Effect Of Leverage, Profitability, Capital Intensity And Corporate Governance On Tax Avoidance. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(1), 13–27. <https://doi.org/10.33019/ijbe.V6I1.391>
- Worokinasih, S., & Imamah, N. (2025). Tax avoidance : the role of profitability, sales growth, corporate social responsibility, corporate size and age. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 14(2), 146–152. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.V14I2.3907>
- Wulandari, A., & Fanani, Z. (2024). Corporate Social Responsibility (CSR) and Tax Avoidance (TA) in Indonesia : Moderated Audit Committee Characteristics. *Accounting Analysis Journal*, 13(2), 106–117. <https://doi.org/10.15294/aaj.V13I2.2586>
- Yuliati, Y. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(8), 3067–3083. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.V5I8.32352>
- Yulyanah, Y., & Kusumastuti, S. Y. (2019). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Media Ekonomi*, 27(1), 17–36. <https://doi.org/10.25105/me.V27I1.5284>
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.V7I1.6315>

